

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Kristalisasi Paradigma Agribisnis
dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Tinggi

IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER – BOGOR
18 APRIL 2015

Editor

Nunung Kusnadi
Amzul Rifin
Anna Fariyanti
Netti Tinaprilla
Burhanuddin
Maryono



Prosiding Seminar Nasional

KRISTALISASI PARADIGMA AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN TINGGI

IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER – BOGOR
18 APRIL 2015

Prosiding Seminar Nasional

KRISTALISASI PARADIGMA AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN TINGGI

IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER – BOGOR
18 APRIL 2015

EDITOR :

NUNUNG KUSNADI
AMZUL RIFIN
ANNA FARIYANTI
NETTI TINAPRILLA
BURHANUDDIN
MARYONO

Prosiding Seminar Nasional
Kristalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Tinggi

IPB International Convention Center – Bogor
18 April 2015

Tim Penyusun

Editor :

- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, M.S
- Dr. Amzul Rifin, S.P, M.A
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, M.Si
- Dr. Ir. Netti Tinaprilla, M.M
- Dr. Ir. Burhanuddin, M.M
- Maryono, S.P, M.Si

Desain Sampul :

- Hamid Jamaludin Muhrim, SE

Tata Letak Isi :

- Hamid Jamaludin Muhrim, S.E
- Triana Gita Dewi, S.E, M.Si
- Tursina Andita Putri, S.E, M.Si

Administrasi Umum :

- Tita Nursiah, S.E
- Tursina Andita Putri, S.E, M.Si

Diterbitkan oleh **Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB**
Bekerjasama dengan **Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI)**
Copyright © 2015

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Telp/Fax : 0251-8629654

e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@apps.ipb.ac.id

Website : <http://agribisnis.ipb.ac.id>

ISBN : 978-602-14623-3-1

KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Agribisnis diselenggarakan dalam rangka Tujuh Puluh Tahun Prof. Bungaran Saragih yang diselenggarakan pada Sabtu 18 April 2015 dengan tema “*Kristalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan dan Pendidikan Tinggi*”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI), Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Pusat Pangan Agribisnis (PPA), PROFITA Unggul Konsultama, *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute* (PASPI) serta AGRINA.

Prof. Bungaran Saragih pada awal tahun 90-an memperkenalkan istilah Agribisnis yang merupakan cara baru dalam melihat pertanian. Hal ini berarti pertanian bukan hanya pada kegiatan usahatani (*on farm activities*) tetapi juga kegiatan di luar usahatani (*off farm activities*). Dengan kata lain, pertanian tidak hanya berorientasi produksi (*production oriented*) tetapi juga berorientasi pasar (*market oriented*), tidak hanya dilihat dari sisi permintaan (*demand side*) tetapi juga dari sisi penawaran (*supply side*).

Prosiding ini merupakan kompilasi artikel-artikel yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Agribisnis tersebut. Latar belakang bidang keilmuan serta daerah penulis yang beragam menghasilkan berbagai perspektif dalam pembangunan agribisnis di Indonesia. Artikel dalam prosiding ini penuh dengan gagasan dan ide-ide baru yang melihat pertanian dalam arti luas yang dikelompokkan ke dalam subtema: Sistem Agribisnis, Pengadaan Input, Usahatani, Pengolahan, Pemasaran, dan Penunjang. Artikel-artikel dalam prosiding ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang agribisnis serta dapat pula dijadikan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan.

Pada kesempatan kali ini, ijinilah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr Rachmat Pambudy, MS; Dr Nunung Kusnadi, MS; Dr Andriyono K Adhi; Dr Suharno, MADev; Dr Anna Fariyanti, MS; Dr Burhanuddin, MM; Dr Netti Tinaprila, MM; Dr Amzul Rifin, MA; Siti Jahroh, PhD, serta Etriya, MM yang telah bekerja keras untuk menilai artikel yang dipresentasikan sehingga layak untuk ditampilkan dalam prosiding ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Hamid Jamaludin M, Tursina Andita Putri, Triana Gita Dewi, dan Tita Nursiah yang telah membantu dalam penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat berkontribusi dalam pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Terimakasih

Bogor, September 2015
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr. Ir. Dwi Rachmina, M.Si

DAFTAR ISI

Sistem Agribisnis

Model Pengembangan Agribisnis Kelapa Terpadu di Kabupaten Indragiri Hilir <i>Djaimi Bakce, dan Syaiful Hadi</i>	1
Perubahan Sistem Agribisnis Petani Hortikultura dalam Menghadapi Era Pasar Modern (Studi Kasus Petani Hortikultura di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung) <i>Gema Wibawa Mukti, Dini Rochdiani, dan Rani Andriani Budi Kusumo</i>	23
Sistem Insentif untuk Mendukung Daya Saing Agribisnis Kopi Rakyat di Jawa Timur <i>Luh Putu Suciati, dan Rokhani</i>	41

Pengadaan Input

Peran Industri Benih Jagung dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kasus di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah) <i>Kurnia Suci Indraningsih</i>	57
Analisis Aksesibilitas Petani Perkotaan terhadap Agroinput dan Implikasinya terhadap Pengembangan <i>Urban Farming</i> <i>Harniati, dan Reni Suryanti</i>	73
Kajian Karakteristik Produsen dan Penangkar Benih Padi di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Wahyuning K. Sejati, dan M. Suryadi</i>	83
Sistem “Jabalsim” Sebagai Solusi untuk Penyediaan Benih Kedelai (Kasus di Kabupaten Wonogiri) <i>Tri Bastuti Purwantini</i>	97
Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pupuk Bersubsidi sebagai <i>Supporting System Agribusiness</i> terhadap Agribisnis Perberasan <i>Surya Abadi Sembiring</i>	109

Usahatani

Pemahaman dan Partisipasi Petani dalam Adopsi Teknologi Biochar di Lahan Kering Blitar Selatan <i>Asnah, Masyhuri, Jangkung Handoyo Mulyo, dan Slamet Hartono</i>	127
Diterminan Pengelolaan Satuan Usaha Perhutanan Kerakyatan (SUPK) di Kawasan Perhutanan Kerakyatan-Tanggamus, Lampung <i>Ismalia Afriani, F. Sjarkowi, Najib Asmani, dan M Yazid</i>	135

Emisi Gas Rumah Kaca Aktivitas <i>On-Farm</i> Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur: Studi Empiris <i>The Environmental Kuznets Curve</i> <i>Gilang Wirakusuma, Irham, dan Slamet Hartono</i>	151
Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan Ditinjau dari Tren Produksi Beras dan Stok Beras Pedagang <i>Desi Aryani</i>	167
Produksi dan Pendapatan Petani Kelapa Dalam (<i>Cocos Nucifera</i> Linn) di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau <i>Sisca Vaulina, dan Saiful Bahri</i>	183
Keunggulan Kompetitif Kedelai: Pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM) (Kasus di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur) <i>Syahrul Ganda Sukmaya, dan Dwi Rachmina</i>	199
Percepatan Adopsi Tanaman Manggis melalui Sekolah Lapang di Kecamatan Mandalawangi Provinsi Banten <i>Asih Mulyaningsih, Imas Rohmawati, dan Suherna</i>	207
Dampak Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Terhadap Efisiensi Teknis Usahatani Kedelai di Kabupaten Jember <i>Indah Ibanah, Andriyono Kilat Adhi, dan Dwi Rachmina</i>	219
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Lobster Laut <i>Sitti Aida Adha Taridala, Asriya, dan Yusnaini</i>	233
Prospek Pengembangan Usahatani Bawang Merah Lokal Palu di Tinjau dari Tingkat Pendapatan di Desa Boluponto Jaya Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi <i>Lien Damayanti, Yulianti Kalaba, dan Erny</i>	245
Analisis Kesiapan dan Strategi Pengembangan Bisnis Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” (Studi Kasus Koperasi Produsen Kopi Margamulya Pangalengan Kabupaten Bandung) <i>Ima Marlina, dan Endah Djuwendah</i>	257
Dampak Ekonomi Karakteristik Peternak terhadap Pola Usaha Kemitraan Ayam Broiler di Daerah Jember, Situbondo, Bondowoso Lumajang dan Banyuwangi <i>Hariadi Subagja, dan Wahjoe Widhijanto Basuki</i>	267
Dampak Konsentrasi Industri terhadap Performans di Industri Broiler Indonesia <i>Anna Fitriani, Heny K. Daryanto, Rita Nuralina, dan Sri Hery Susilowati</i>	279
Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Kelapa Sawit di Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar <i>Elinur, dan Asrol</i>	297
Introduksi Potensi Integrasi Sapi-Sawit dalam Mendukung Akselerasi Peningkatan Produksi Daging Sapi Nasional <i>Priyono</i>	311
Perilaku Harga Bawang Putih Jawa Timur dan Cina <i>Herdinastiti</i>	325

Performansi Pembagian Kerja antara Laki-Laki dan Perempuan pada Usahatani Kentang <i>Ana Arifatus S, dan Dyanasari</i>	339
--	-----

Pengolahan

Potensi Sumberdaya Pertanian Lokal dalam Pemenuhan Kebutuhan Bahan Pangan Sumber Karbohidrat di Provinsi Bengkulu <i>Putri Suci Asriani, dan Bonodikun</i>	357
Perbandingan Analisis Nilai Tambah Kopi Arabika dengan Metode Proses Pengolahan Kering dan Basah (Studi Kasus pada Malabar Mountain Coffee PT. Sinar Mayang Lestari, Kabupaten Bandung) <i>Resty Tyagita Aprilia, dan Tuti Karyani</i>	371
Analisis Penerapan Manajemen Mutu Susu Pasteurisasi (Studi Kasus Unit Susu Pasteurisasi Pondok Modern Darul Ma'rifat Gontor 3 Desa Sumbercangkkring Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri) <i>Akhadiyah Afrila, dan Asnah</i>	385
Studi Komparasi Nilai Tambah Produk Olahan Kentang Granola di Wilayah Pangalengan (Jawa Barat) dengan Banjarnegara (Jawa Tengah) <i>Vela Rostwentiavi Sinaga, dan Doni Sahat Tua Manalu</i>	397
Pengembangan Agroindustri Teh Rakyat dengan Pendekatan <i>Soft System Methodology</i> (Studi Kasus di Kabupaten Bandung) <i>Sulistiyodewi NW</i>	409
Karakteristik Pengusahaan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat <i>Tursina Andita Putri</i>	421

Pemasaran

Pengaruh Konsep Produk, Budaya Konsumsi, Keluarga terhadap Perilaku Konsumen Mengonsumsi Produk Kebab (Studi Kasus: Kebab Turki XXX) <i>Adhi Tejo Dwicahyo, Nunuk Adiarni, dan Mudatsir Najamuddin</i>	441
<i>The Demand and Competition Among Supply Source in Indonesia Meat Import Market</i> <i>Resti Prastika Destiarni, Ahmad Syariful Jamil, dan Netti Tinaprilla</i>	455
Kinerja Rantai Pasok Komoditas Bawang Daun (<i>Allium fistulosum L.</i>) di Koperasi untuk Memenuhi Permintaan Pasar Terstruktur (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat) <i>Nurul Risti Mutiarasari, Eddy Renaldi, dan Ery Supriyadi Rustidja</i>	469
Analisis Determinan Permintaan Kopi Arabika di Provinsi Sumatera Utara <i>Rahmanta</i>	489

Analisis Permintaan dan Penawaran Tembakau Besuki Na Oogst di Kabupaten Jember Jawa Timur <i>Novi Haryati, Soetrisno, dan Anik Suwandari</i>	503
Analisis Permintaan Impor Garam Indonesia dengan Pendekatan <i>Almost Ideal Demand System</i> <i>Ahmad Syariful Jamil, Netti Tinaprilla, dan Suharno</i>	517
Analisis Tataniaga Pisang sebagai Daya Ungkit Revitalisasi Pengembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah <i>Endang Siti Rahayu, dan Joko Sutrisno</i>	531
Sistem Pemasaran Karet dengan Pendekatan <i>Food Supply Chain Network (FSCN)</i> di Kabupaten Tebo, Jambi <i>Rikky Herdiyansyah, Rita Nurmalina, dan Ratna Winandi A</i>	545

Penunjang

Potensi Pengembangan Agrowisata dan Konservasi Ex-Situ Tumbuhan Kantong Semar (<i>Nepenthes sp.</i>) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau <i>Ryan Budi Setiawan, dan Eksa Rusdiyana</i>	565
Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Budidaya Ikan Patin Penerima dan Non Penerima Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi “PUKK” PT Perkebunan Nusantara V <i>Rika Amelia Jas, Amzul Rifin, dan Netti Tinaprilla</i>	575
Efektivitas Perilaku Komunikasi di Dalam Sekolah Lapang – Pengelolaan Tanaman Terpadu di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor <i>Ali Alamsyah Kusumadinata</i>	585
Karakteristik Perempuan Wirausaha di Lingkar Kampus Institut Pertanian Bogor, Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor <i>Iqbal Reza Fazlurrahman, Anna Fariyanti, dan Suharno</i>	603
Biaya Transaksi pada Pembiayaan Usahatani Kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur <i>Hardiyanti Sultan, Dwi Rachmina, dan Anna Fariyanti</i>	615
Proses Penumbuhan dan Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) (Kasus di LKMA Sejahtera, Kabupaten Lamongan) <i>Ratih Apri Utami, Lukman M. Baga, dan Suharno</i>	631
Faktor atas Pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Program Studi Agribisnis <i>Anita Primaswari Widhiyani, dan Triana Gita Dewi</i>	647

BIAYA TRANSAKSI PADA PEMBIAYAAN USAHATANI KEDELAI DI KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR

Hardiyanti Sultan¹⁾, Dwi Rachmina²⁾, dan Anna Fariyanti²⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Magister Sains Agribisnis, FEM, Institut Pertanian Bogor

²⁾Staf Pengajar Departemen Agribisnis, FEM, Institut Pertanian Bogor

E-mail: ¹⁾hardiyantisultan91@gmail.com

ABSTRACT

Farmer's participation in both formal and informal financial institution drives transaction cost which influence their profit. Ubiquitous is the characteristic that embeded in transaction cost which make it hardly to identify. The objective of this research was to analyze the cost structure in soya farmers. Transaction Cost Analysis was the method that used in this research and here, we would analyze deeply about components and amountof transaction cost. 120 farmers in Lamongan, Jawa Timur were interviewed to derive the data. We revealed that transcation costare included: (1) information cost; (2) negotiation cost; (3) coordination cost and (4) enforcement cost. In average, both formal and informal farmers's loan wasRp517.052,63 and trancastion cost was Rp 38.622,50. It can be said that Rp 7.496,74 should be paid as transaction cost every Rp 100.000 loan. To get finance from formal institution, farmers should pay Rp 9.407,60 as transaction cost. That is cheaper compare that non formal institution which the transaction cost was Rp 12.531,25. For both formal and non formal finance institution, transaction cost consist of 44,84% information cost, 10,64% negotiation cost, 15,99% coordination cost and 28,54% enforcement cost. For formal finance institution itself, transaction cost consist of 44,24% information cost, 9,94% negotiation cost, 16,29% coordination cost and 29,53% enforcement cost. Further, for non formal finance institution, transaction cost consist of 54,78% information cost, 23,94% negotiation cost, 16,96% coordination cost and 4,32% enforcement cost. Information cost was the highest cost for both formal and non formal finance institution.

Keyword(s): *ubiquitous, farming business, finance institutions, transaction costs*

ABSTRAK

Keterlibatan petani baik dalam lembaga pembiayaan formal maupun non formal menimbulkan biaya transaksi yang akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keuntungan usahatani. Biaya transaksi yang bersifat *ubiquitous* membuat biaya ini sulit untuk diidentifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai. Metode yang digunakan yaitu *Transaction Cost Analysis* dengan penelusuran mendalam mengenai komponen dan jumlah biaya transaksi yang terbentuk. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan jumlah sampel 120 petani kedelai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai di Kabupaten Lamongan terdiri dari (1) biaya informasi; (2) biaya negosiasi; (3) biaya koordinasi dan (4) biaya pelaksanaan. Rata-rata pinjaman petani baik dari lembaga pembiayaan formal maupun non formal sebesar Rp517.052,63 dengan rata-rata biaya transaksi sebesar Rp 38.622,50. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 100.000 pinjaman akan dikeluarkan biaya transaksi sebesar Rp 7.496,74. Untuk pembiayaan formal biaya transaksi yang dikeluarkan sedikit lebih kecil yaitu sebesar Rp 9.407,60 dibandingkan dengan pembiayaan non formal sebesar Rp 12.531,25. Komponen biaya transaksi pada pembiayaan formal maupun non formal adalah biaya

informasi sebesar 44,84%, biaya negosiasi sebesar 10,64%, biaya koordinasi sebesar 15,99% dan biaya pelaksanaan sebesar 28,54%. Untuk pembiayaan formal komponen biaya transaksi terdiri dari biaya informasi sebesar 44,24%, biaya negosiasi sebesar 9,94%, biaya koordinasi sebesar 16,29% dan biaya pelaksanaan sebesar 29,53%. Sedangkan untuk pembiayaan non formal komponen biaya transaksi terdiri dari biaya informasi sebesar 54,78%, biaya negosiasi sebesar 23,94%, biaya koordinasi sebesar 16,96% dan biaya pelaksanaan sebesar 4,32%.

Kata Kunci: *ubiquitous*, usahatani, lembaga pembiayaan, biaya transaksi.

PENDAHULUAN

Biaya transaksi adalah biaya selain harga barang/jasa yang dikeluarkan dalam perdagangan barang/jasa. Biaya transaksi ini terjadi karena adanya informasi yang tidak sempurna (*imperfect information*) dan keterbatasan dalam mengolah informasi tersebut. Biaya transaksi dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan diluar atau selain dari biaya produksi. Keberadaan biaya ini akan meningkatkan total biaya yang akan dikeluarkan dalam sebuah usaha. Tingginya biaya yang akan dikeluarkan pelaku usaha karena adanya biaya transaksi akan mengakibatkan perbedaan harga yang diterima oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen.

Dalam usahatani, biaya menjadi hal yang sangat penting untuk diukur. Biaya akan menentukan pendapatan bersih usahatani. Untuk usahatani skala kecil, jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan diduga tidak terhitung secara keseluruhan. Biaya yang tidak terhitung inilah yang diduga sebagai biaya transaksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi biaya ini sehingga pelaku usaha atau petani biasanya menjadikan biaya ini sebagai hal yang lumrah yang tidak perlu untuk dikategorikan sebagai biaya yang harus dihitung.

Dengan kata lain bahwa total biaya yang dikeluarkan selama proses usahatani tidak melibatkan atau tidak menghitung jumlah biaya transaksi. Sedangkan diketahui bahwa total biaya akan berpengaruh terhadap pendapatan bersih usahatani. Tingkat pendapatan yang seharusnya bisa lebih tinggi menjadi tidak dapat direalisasikan karena keberadaan biaya transaksi.

Biaya transaksi muncul setelah terjadi kegiatan pertukaran dalam sebuah kegiatan usaha. Pertukaran ini dapat berupa barang/jasa yang akan dijual ataupun pertukaran informasi mengenai harga barang/jasa atau informasi lainnya yang menyangkut tentang keberlanjutan usaha tersebut. Pada mulanya kegiatan transaksi dinilai sebagai kegiatan *free of cost*. Namun setelah beberapa ekonom melakukan penelitian, ditemukan bahwa kegiatan transaksi ini memunculkan beberapa biaya yang seharusnya dihitung dan dimasukkan kedalam total biaya dalam memproduksi sebuah barang/jasa.

Dalam beberapa kasus mengenai perdagangan barang/jasa khususnya perdagangan dalam skala kecil seperti perdagangan produk pertanian yang berada di pedesaan, biaya transaksi ini sulit untuk diidentifikasi oleh pelaku usaha. Berge *et. al.* (2011) mengemuka-

kan bahwa rendahnya tingkat pendidikan pelaku usaha di pedesaan mengakibatkan sulitnya pelaku usaha untuk membedakan atau mengklasifikasikan semua bentuk biaya yang akan atau telah dikeluarkan. D'Hondt (2008) mengatakan bahwa biaya transaksi yang rendah secara otomatis akan meningkatkan keuntungan yang dalam hal ini berarti bahwa peningkatan biaya transaksi akan menurunkan tingkat keuntungan.

Keterlibatan petani baik dalam lembaga pembiayaan atau lembaga lainnya diduga akan menimbulkan biaya transaksi yang kemudian akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keuntungan usaha. Kurangnya informasi serta akses yang dimiliki petani terhadap lembaga pembiayaan baik formal maupun non formal menjadikan timbulnya biaya transaksi. Sebagaimana dikatakan oleh Baye (2010) bahwa biaya transaksi muncul karena adanya ketidaksempurnaan informasi (*imperfect information*) dan keterbatasan dalam mengolah informasi tersebut.

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang merupakan lokasi penelitian ini termasuk salah satu kabupaten yang menerima pinjaman dana dari lembaga pembiayaan formal yaitu Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang pembentukannya dimulai pada awal tahun 2013. Pembentukan LKMA ini atas dasar penciptaan Gapoktan Mandiri oleh program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang sebelumnya telah terealisasi sejak tahun 2011. Beberapa petani yang menerima pinjaman modal ini adalah petani kedelai yang tergabung dalam sebuah Gabungan

Kelompok Tani (Gapoktan). Namun disamping itu juga ada beberapa petani yang tidak mengajukan dan tidak menerima pinjaman modal dari LKMA. Beberapa petani yang dimaksud mendapatkan pinjaman modal dari lembaga pembiayaan formal lainnya seperti koperasi atau kelompok tani dan dari bank komersial. Selain itu, ada juga beberapa petani yang meminjam modal dari lembaga pembiayaan non formal yaitu melalui keluarga atau kerabat, pedagang perantara (*tengkulak/ middlement*) dan dari pedagang output.

Akses petani kedelai untuk menerima pinjaman modal dari beberapa lembaga pembiayaan ini dimulai dari pengurusan dokumen hingga pengembalian pinjaman diduga akan menimbulkan biaya transaksi. Moss (2013) mengatakan bahwa biaya transaksi tidak dapat dihilangkan dengan kata lain secara realita, biaya transaksi sebesar nol tidak dapat terjadi. Selain itu biaya transaksi sangat beragam dan terdapat dimanamana (*ubiquitous*). Sifat biaya transaksi ini membuat para pelaku usaha terkadang tidak dapat menemukan dan mengidentifikasi keberadaan biaya ini sehingga hal ini berdampak pada keuntungan usaha yang akan didapatkan karena biaya yang semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep Biaya Transaksi

Williamson (1989) sebagai salah satu penggiat ternama ekonomi kelem-

bagaan berpendapat bahwa transaksi adalah transfer/perpindahan barang dari satu tahap ke tahap lain melalui teknologi yang terpisah. Satu tahapan selesai dan tahap berikutnya dimulai. Transaksi merupakan perpindahan barang, jasa, informasi, pengetahuan, dan lain-lain dari satu tempat (komunitas) ke tempat (komunitas) lain atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen, atau pemindahan barang dari satu individu ke individu yang lain. Hal ini disebut transaksi fisik/*delivery*.

Biaya transaksi adalah biaya yang harus ditanggung oleh semua pihak yang melakukan proses pertukaran. Menurut Williamson (1989) biaya transaksi muncul karena adanya informasi yang samar, semu dan tidak fokus. Biaya ini ditemukan dalam kegiatan yang sering terulang (*frequent*) yang bersifat khusus (*speciality*) dengan kondisi pelaku usaha yang memiliki daya nalar yang terbatas (*limited rationality*) dan biasanya berperilaku spekulatif (*opportunist*).

Coase dalam Moss (2013) mengatakan bahwa biaya transaksi adalah biaya mengorganisasi sebuah transaksi, biaya untuk situasi yang spesifik dan biaya untuk masuk kedalam pasar. Biaya transaksi ini muncul untuk menjalankan sistem ekonomi (*the cost of running the economic system*). Oleh sebab itu dikatakan bahwa biaya transaksi akan banyak ditemukan pada pendekatan kelembagaan untuk menjalankan sebuah sistem ekonomi. Berdasarkan hal tersebut Coase merinci lebih jauh tentang biaya transaksi yaitu biaya yang dikeluarkan dalam transfer modal (asset) dari satu institusi ke institusi yang lain. Dalam

papernya Coase menyebut biaya transaksi sebagai biaya yang timbul karena pelaksanaan mekanisme harga (*the cost of using the price mechanism*). Coase mengatakan keputusan untuk melangsungkan transaksi dalam sebuah perusahaan atau pasar ditentukan oleh biaya transaksi dan biaya transaksi itu sangat beragam dan terdapat dimana-mana (*ubiquitous*).

Baye (2010) mengatakan bahwa saat sebuah perusahaan akan mengadakan input, maka akan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Biaya ini disebut sebagai biaya transaksi. Jenis biaya transaksi tersebut adalah:

1. Biaya untuk mencari *supplier* sebagai penyedia input
2. Biaya untuk negosiasi harga pada input yang akan dibeli. Biaya ini biasa termasuk biaya imbalan, *legal fees* dan lain-lain.
3. Beberapa investasi lainnya dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pertukaran.

Konsep Modal dan Sumber Pembiayaan

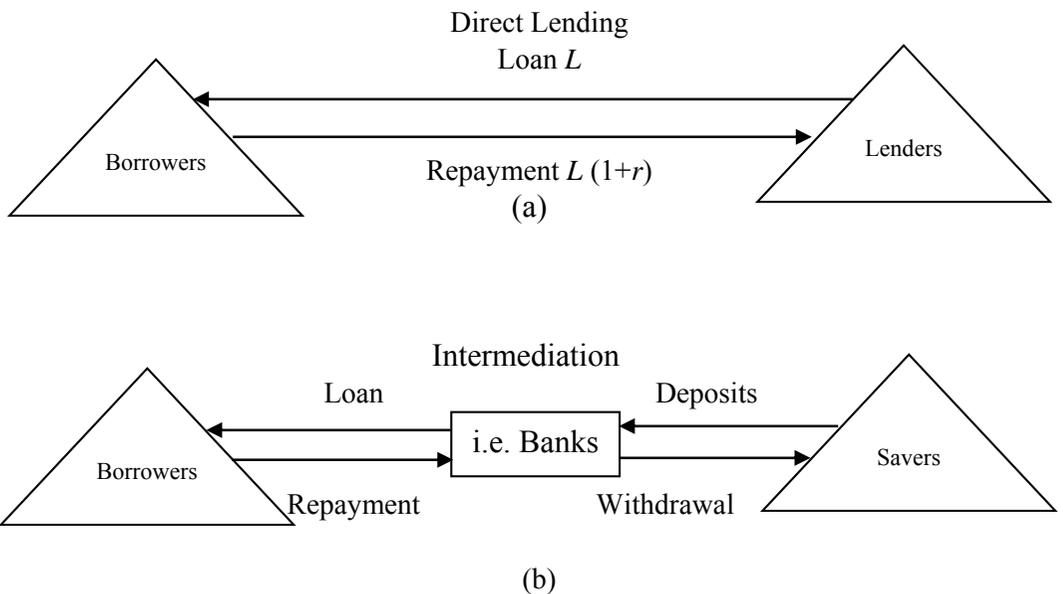
Modal dalam usahatani sangat berkaitan dengan sumber pembiayaan baik internal ataupun eksternal. Sumber pembiayaan internal (*internal sources*) yakni sumber-sumber pembiayaan yang ada dalam penguasaan pemilik usaha dan sumber pembiayaan eksternal (*external sources*) yakni sumber-sumber pembiayaan yang berada di luar usaha atau yang diluar dari penguasaan pemilik usaha. Sumber pembiayaan internal dapat berasal dari *surplus* usaha atau dalam skala perusahaan disebut sebagai *return*

earning yaitu jumlah laba ditahan setelah dibagikan kepada masing-masing pemilik saham perusahaan. Laba ditahan ini yang akan dijadikan lagi sebagai modal usaha. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal berasal dari pinjaman atau kredit.

Penambahan modal melalui sumber pembiayaan eksternal digolongkan menjadi dua jenis menurut Moss (2013) yaitu peminjaman secara langsung dan peminjaman kepada lembaga yang bertindak sebagai perantara. Peminjaman secara langsung dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada pemberi pinjaman dan peminjaman melalui perantara adalah peminjaman antar pelaku usaha dan pemberi pinjaman melalui sebuah lembaga yang bertindak sebagai inter-

mediasi. Berikut adalah skema peminjaman modal antar pelaku usaha dan pemberi pinjaman.

Berdasarkan Gambar 1(a) lembaga pembiayaan akan berhubungan langsung dengan pihak peminjam. Biasanya ini akan terjadi pada pembiayaan non formal misalnya antara petani dengan tengkulak atau antara petani dengan keluarga atau kerabat. Peminjaman secara langsung (*direct lending*) biasanya akan menghabiskan biaya yang lebih besar daripada peminjaman melalui perantara. Biaya tersebut antara lain biaya untuk mencari pemberi pinjaman (*lenders* atau *individual creditors*), biaya untuk bernegosiasi dan sebagainya.



Sumber: Moss (2013)

Gambar 1. Perbandingan *direct lending* dan *intermediation*

Sedangkan pada Gambar 1(b), sumber pinjaman eksternal dapat berasal dari lembaga keuangan formal yang bertindak sebagai pihak perantara antara pelaku usaha/*borrowers* dan *depositors/savers*. *Depositors* akan menyimpan uangnya pada lembaga keuangan sebagai deposito kemudian lembaga keuangan akan meminjamkan uang deposito tersebut kepada peminjam. Selanjutnya peminjam akan mengembalikan pinjaman kepada lembaga keuangan lalu akan digunakan kembali untuk *depositor*. Lembaga keuangan yang biasanya melakukan proses ini adalah lembaga keuangan formal seperti bank.

Keberadaan bank sebagai perantara antara peminjam dan *depositors* akan memberikan beberapa manfaat untuk peminjam modal misalnya, akan mengurangi biaya pencarian dan biaya *aggregation*. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang digunakan untuk mencari pemberi pinjaman (*individu*) yang bersedia memberikan pinjaman dalam jumlah berapapun. Dengan melakukan peminjaman kepada bank yang telah tersedia maka biaya untuk mencari *individual creditors* akan berkurang (Moss, 2013).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Jawa Timur adalah produsen kedelai terbesar di Indonesia (Lampiran). Untuk pemilihan beberapa kecamatan yang dijadikan sampel didasarkan pada kecamatan yang telah

memiliki LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) sebagai sumber pembiayaan eksternal yang dalam pengurusannya akan terdapat biaya transaksi dimana biaya ini akan berpengaruh terhadap keuntungan usahatani. Kecamatan yang terpilih terdiri dari 3 kecamatan dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Kecamatan ini antara lain Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Mantup. Penelitian dilakukan pada bulan September 2014 hingga Februari 2015, yang meliputi kegiatan pengambilan data, pengolahan data, analisis data dan pelaporan hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai sedangkan data sekunder adalah data usahatani kedelai tahun 2014 yang diperoleh dari data Program Unggulan Departemen (PUD) Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB). Data sekunder lainnya diperoleh dari data statistik pemerintah serta dari lembaga pemerintahan setempat misalnya data populasi petani kedelai yang terdapat di lokasi penelitian, data tentang sumber pembiayaan yang digunakan dan data produktivitas kedelai di lokasi penelitian. Selain itu data sekunder yang digunakan juga berasal dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian ilmiah.

Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* dengan

pembagian proporsi yang rata untuk setiap kecamatan. Metode ini dilakukan karena telah terdapat *sampling frame* untuk masing-masing kecamatan terpilih. Jumlah keseluruhan sampel adalah 120 petani kedelai yang berasal dari Kecamatan Tikung sebanyak 51 orang, Kecamatan Kembangbahu sebanyak 18 orang dan Kecamatan Mantup sebanyak 51 orang. Penentuan ini berdasarkan proporsi jumlah kelompok tani yang terpilih pada masing-masing kecamatan

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode *survey*. Data primer diperoleh melalui pemberian angket berstruktur dan wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara langsung kepada sampel (petani kedelai) dan informan kunci untuk mendapatkan data secara akurat. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui data statistik dan melalui jurnal atau hasil penelitian ilmiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu metode *Transaction Cost Analysis* dengan penelusuran mendalam mengenai komponen dan jumlah biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai. Dengan metode ini maka akan teridentifikasi struktur biaya transaksi yang terdapat pada pembiayaan usahatani kedelai dan juga akan teridentifikasi jumlah untuk masing-masing komponen biaya transaksi.

Untuk menghitung total biaya transaksi dari masing-masing komponen biaya transaksi yang ada digunakan persamaan:

$$\text{TrC} = \sum Z_i \dots \dots \dots (1)$$

Rasio masing-masing komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi (Z) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Z = \frac{Z_i}{\text{TrC}} : \sum Z_i = 1 \dots \dots \dots (2)$$

Biaya transaksi dibagi kedalam dua bagian yaitu biaya transaksi pada pembiayaan formal dan biaya transaksi pada pembiayaan non formal. Selanjutnya akan dilihat perbandingan untuk setiap komponen biaya transaksi pada dua sumber pembiayaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai di Kabupaten Lamongan terdiri dari (1) biaya informasi; (2) biaya negosiasi; (3) biaya koordinasi dan (4) biaya pelaksanaan. Biaya informasi menurut Baye (2010) adalah setiap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi mengenai kepentingan usaha, misalnya informasi harga, informasi budidaya, ataupun informasi mengenai sumber pembiayaan. Biaya negosiasi adalah biaya yang dikeluarkan saat melakukan negosiasi dengan pihak yang ingin diajak bekerjasama (Baye, 2010; Williamson, 1989) misal pemberian upah untuk orang yang dipekerjakan untuk mengurus dokumen peminjaman modal atau biaya yang dike-

luarkan untuk mempertahankan kontrak peminjaman modal pada pembiayaan non formal. Biaya koordinasi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan penyesuaian kesepakatan antar setiap pelaku usaha yang terlibat (Williamson, 1989) misal biaya yang dikeluarkan pada saat mengambil pinjaman dan pada saat mengembalikan pinjaman. Biaya pelaksanaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan (Coase dalam Moss, 2013) yang dilakukan yang dalam hal ini adalah pengadaan pinjaman modal, misalnya biaya administrasi dan biaya pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman modal. Masing-masing komponen biaya transaksi ini dibagi kedalam beberapa item yaitu:

1. Biaya informasi

- a. Biaya pulsa. Biaya ini dikeluarkan oleh petani kedelai saat ingin mendapatkan informasi mengenai sumber pembiayaan apa saja yang tersedia di Kabupaten Lamongan melalui perantara elektronik yaitu telepon genggam (*handphone*). Biaya pulsa ini juga dikeluarkan jika petani mempunyai pekerja suruhan, misalnya melakukan komunikasi dengan pekerja suruhan untuk mengetahui semua informasi yang dimiliki pekerja.
- b. Biaya dengar. Biaya ini dikeluarkan oleh petani kedelai untuk mengetahui semua informasi mengenai sumber pembiayaan misalnya melalui perbincangan di warung kopi dengan petani lainnya.

2. Biaya negosiasi

- a. Biaya upah. Biaya ini dikeluarkan oleh petani kedelai pada saat melakukan pembayaran kepada orang yang dipekerjakan untuk mengurus dokumen peminjaman modal.
- b. Biaya tawar. Biaya ini dikeluarkan pada saat melakukan tawar menawar mengenai jumlah pinjaman modal. Biasanya biaya ini dikeluarkan pada pembiayaan non formal.
- c. Biaya mempertahankan kontrak. Biaya ini juga biasanya dikeluarkan pada pembiayaan non formal, yaitu pada saat melakukan pertemuan dengan pemilik modal untuk memperpanjang kontrak peminjaman modal.

3. Biaya koordinasi

- a. Biaya pertemuan saat peminjaman modal. Biaya ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan petani saat mengambil modal yang dipinjamkan oleh lembaga pembiayaan ataupun dari pemilik modal.
- b. Biaya pertemuan saat pengembalian modal. Biaya ini dikeluarkan pada saat mengembalikan atau membayar pinjaman modal.

4. Biaya pelaksanaan

- a. Biaya administrasi. Biaya ini dikeluarkan petani pada saat melakukan pendaftaran untuk memperoleh pinjaman modal. Biaya ini biasanya terdapat pada pembiayaan formal.
- b. Biaya pengurusan dokumen. Biaya ini adalah keseluruhan biaya yang

dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan pinjaman modal misalnya biaya fotokopi berkas (sertifikat kepemilikan lahan, KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Usahatani).

- c. Biaya upah. Biaya ini dikeluarkan oleh petani yang memiliki pekerja suruhan untuk mengurus dokumen peminjaman modal.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa komponen biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai yang memiliki persentase tertinggi adalah biaya informasi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan baik formal maupun informal, petani kedelai membutuhkan beberapa informasi dari beberapa orang yang telah lebih dahulu menerima pinjaman modal. Informasi ini dapat diperoleh oleh petani dengan cara melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber informasi atau pemberi informasi. Komunikasi secara langsung yang dimaksud adalah beberapa petani melakukan perbincangan di warung-warung makan untuk membahas tentang sumber pembiayaan yang tersedia. Pembahasan menyangkut tentang prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh petani untuk mendapatkan pinjaman modal. Biasanya

petani akan mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi ini. Biaya ini dikenal dengan sebutan biaya dengar. Petani mengeluarkan uang untuk membayar makanan dan minuman yang dikonsumsi selama melakukan perbincangan.

Selain itu, komunikasi juga biasanya dilakukan melalui media elektronik (*handphone*). Petani akan melakukan komunikasi dengan pemilik informasi atau dengan orang-orang yang telah menerima pinjaman modal lebih dulu. Biaya ini disebut juga biaya pulsa. Beberapa petani yang mengeluarkan biaya ini adalah petani yang kediamannya jauh dari sumber informasi.

Komponen biaya transaksi dengan persentase tertinggi kedua adalah biaya pelaksanaan. Biaya ini terdiri dari biaya administrasi dan biaya pengurusan dokumen peminjaman modal seperti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan fotokopi RUA (Rancangan Usahatani). Dokumen ini merupakan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga pembiayaan formal yaitu LKMA. Sedangkan untuk lembaga pembiayaan formal lainnya seperti bank, dibutuhkan fotokopi sertifikat kepemilikan lahan juga terdapat biaya untuk administrasi.

Tabel 1. Rata-Rata Biaya Transaksi pada Pembiayaan Usahatani Kedelai

Komponen Biaya Transaksi	Biaya informasi	Biaya negosiasi	Biaya koordinasi	Biaya pelaksanaan	Total
Jumlah (Rp)	17.317,08	4.108,33	6.175,00	11.022,08	38.622,50
Persentase (%)	44,84	10,64	15,99	28,54	100

Tabel 2. Rata-Rata Biaya Transaksi pada Pembiayaan Formal Usahatani Kedelai

Komponen Biaya Transaksi	Biaya informasi	Biaya negosiasi	Biaya koordinasi	Biaya pelaksanaan	Total
Jumlah (Rp)	22.042,94	4.952,94	8.117,65	14.713,53	49.827,06
Persentase (%)	44,24	9,94	16,29	29,53	100

Biaya koordinasi dan biaya negosiasi adalah biaya transaksi pada pembiayaan usahatani dengan persentase terendah. Biaya koordinasi lebih tinggi 5,35% dari biaya negosiasi. Biaya koordinasi dan biaya negosiasi lebih besar dikeluarkan pada pembiayaan non formal. Hal ini disebabkan pembiayaan non formal hanya berlandaskan pada asas saling percaya sehingga beberapa persyaratan tidak dibuat secara baku melainkan hanya melalui koordinasi dan negosiasi antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Untuk lebih jelasnya, biaya transaksi pada pembiayaan formal tersaji pada Tabel 2 dan biaya transaksi pada pembiayaan non formal tersaji pada Tabel 3.

Pada pembiayaan formal, komponen biaya transaksi yang tertinggi adalah biaya informasi dengan persentase sebesar 44,24% yaitu Rp 22.042,94 dari total biaya transaksi Rp 49.827,06. Biaya informasi pada pembiayaan formal adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk memperoleh informasi tentang sumber pembiayaan formal yang tersedia baik itu bank, koperasi/keompok tani ataupun LKMA. Petani akan berupaya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum memutuskan untuk meminjam modal pada salah satu lembaga yang diinginkan. Hal ini dilakukan petani untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau hambatan-hambatan yang mungkin saja akan terjadi

jika informasi yang didapatkan tidak sempurna.

Biaya pelaksanaan dengan persentase tertinggi kedua menunjukkan bahwa dalam pengadaan hingga pengembalian pinjaman modal pada pembiayaan formal akan mengeluarkan lebih banyak biaya seperti biaya administrasi yang telah diatur oleh lembaga pembiayaan formal itu sendiri serta biaya-biaya untuk pengadaan dokumen sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman modal. Selain biaya pelaksanaan, juga terdapat biaya koordinasi sebesar 16,29%. Pada pembiayaan formal biaya ini berupa biaya pertemuan saat pengambilan pinjaman modal dan biaya saat pengembalian modal pinjaman. Lembaga pembiayaan formal tidak akan secara langsung memberikan pinjaman modal ketika nasabah atau pihak peminjam telah selesai mendaftarkan diri melainkan harus menunggu beberapa hari untuk dapat mengambil modal yang akan dipinjam. Begitu pula dengan yang terjadi pada lokasi penelitian. Setelah mendaftarkan diri sebagai nasabah atau peminjam maka dibutuhkan beberapa hari untuk mengambil pinjaman modal tersebut. Namun jika nasabah bukan merupakan nasabah baru, maka waktu pinjaman modal akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (peminjam dan pemberi pinjaman). Untuk lembaga pembiayaan formal seperti bank, nasabah bisa kapan saja untuk

meminjam modal dengan syarat bahwa pinjaman modal yang sebelumnya telah dikembalikan. Berbeda halnya dengan koperasi atau kelompok tani, nasabah boleh mengambil pinjaman modal selanjutnya walaupun pinjaman modal sebelumnya belum dibayarkan sepenuhnya. Hal ini kemudian akan menjadi tanggung jawab dari ketua kelompok tani itu sendiri. Sedangkan untuk LKMA, peminjaman modal akan sesuai dengan jadwal pencairan uang dari bank yang diajak kerjasama pada program PUAP sebelumnya. Pada lokasi penelitian, bank yang menyediakan dana PUAP adalah BRI (Bank Rakyat Indonesia). Setelah pinjaman modal yang sebelumnya telah dikembalikan atau disetor kembali kepada pihak bank, maka

butuh waktu selama kurang lebih satu minggu untuk menunggu pencairan modal berikutnya. Saat pinjaman modal telah dicairkan, maka pihak LKMA akan segera membagikan dana tersebut kepada masing-masing ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) untuk selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok tani yang membutuhkan pinjaman modal.

Persentase terendah untuk biaya transaksi pada pembiayaan formal adalah biaya negosiasi. Biaya ini terdiri dari upah untuk pekerja suruhan yang diberikan tugas untuk membantu dalam kelancaran pengurusan dokumen pemin-

jaman modal. Biasanya biaya ini dikeluarkan oleh petani yang kurang pengetahuan tentang pinjam meminjam sehingga akan ada beberapa orang yang bersedia menawarkan jasanya untuk membantu dalam melancarkan urusan peminjaman modal tersebut. Biaya negosiasi pada pembiayaan formal memiliki nilai yang tidak terlalu besar sebab pada pembiayaan formal segala sesuatunya telah diatur berdasarkan lembaga pembiayaan masing-masing. Sehingga tidak ada pihak peminjam yang bisa melakukan negosiasi-negosiasi kepada pihak pemberi pinjaman yang tidak berdasarkan atas aturan lembaga pembiayaan formal itu sendiri. Berbeda halnya dengan pembiayaan non formal dengan persentase biaya negosiasi yang lebih tinggi daripada biaya koordinasi dan biaya pelaksanaan. Biaya transaksi pada pembiayaan non formal dijelaskan pada Tabel 3.

Biaya informasi juga mendominasi biaya transaksi pada pembiayaan non formal. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting baik pada pasar modal maupun pada pasar barang. Informasi yang tidak sempurna akan memunculkan biaya transaksi (Baye, 2010). Hal inilah yang terjadi pada pembiayaan formal maupun pembiayaan non formal pada usahatani kedelai.

Tabel 3. Rata-Rata Biaya Transaksi pada Pembiayaan Non Formal Usahatani Kedelai

Komponen Biaya Transaksi	Biaya informasi	Biaya negosiasi	Biaya koordinasi	Biaya pelaksanaan	Total
Jumlah (Rp)	23.535,71	10.285,71	7.285,71	1.857,14	42.964,29
Persentase (%)	54,78	23,94	16,96	4,32	100

Ketidaktepatan informasi yang dimiliki oleh petani kedelai menyebabkan petani kedelai harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi tersebut. Sama halnya dengan pembiayaan formal, biaya informasi pada pembiayaan non formal juga berupa biaya pulsa dan biaya dengar yang dikeluarkan oleh petani untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai sumber pembiayaan yang tersedia. Jika dibandingkan dengan persentase biaya informasi pada pembiayaan formal dengan pembiayaan non formal, maka biaya informasi pada pembiayaan non formal memiliki persentase yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan biaya untuk mencari *individual creditor* atau pemberi pinjaman perseorangan lebih besar dibandingkan mencari informasi mengenai lembaga pembiayaan formal yang telah diketahui oleh beberapa orang. Skala usaha bukan menjadi jaminan bahwa seseorang bisa memberikan pinjaman modal kepada orang lain, seperti yang terjadi di lokasi penelitian yang ternyata beberapa dari pihak pemberi pinjaman bukan merupakan orang yang memiliki skala usaha yang lebih besar dibandingkan beberapa petani lainnya. Kesulitan dalam mencari pihak pemberi pinjaman yang membuat petani akan mengeluarkan biaya informasi yang lebih besar pada pembiayaan non formal daripada pembiayaan formal namun terkadang hal ini tidak disadari oleh petani.

Meskipun terdapat beberapa petani yang mengetahui perbedaan tersebut, namun mereka akan tetap memilih *individual creditor* sebagai pihak yang

akan memberikan mereka pinjaman modal. Beberapa dari mereka akan memberikan alasan bahwa melakukan pinjaman kepada perseorangan lebih mudah dalam hal akses baik peminjaman maupun pengembalian modal daripada melakukan pinjaman pada lembaga pembiayaan formal. Pada lokasi penelitian, peminjaman modal pada perseorangan menggunakan asas saling percaya untuk setiap aturan yang disepakati. Hal inilah yang membuat petani lebih nyaman dalam melakukan pinjaman karena merasa tidak terbebani oleh aturan-aturan yang mengikat.

Komponen biaya transaksi dengan persentase tertinggi kedua adalah biaya negosiasi. Pada pembiayaan non formal, biaya negosiasi yang dikeluarkan petani berupa biaya tawar dan biaya mempertahankan kontrak. Biaya tawar adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan negosiasi jumlah pinjaman modal. Pada pembiayaan non formal ini, petani berhak untuk mengajukan jumlah modal yang ingin dipinjam kepada pemberi pinjaman. Sehingga proses tawar menawar akan terjadi antara petani dan pemberi pinjaman. Kegiatan tawar menawar ini tidak terjadi dalam satu waktu saja, melainkan bisa terjadi pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan ini biasanya terjadi di tempat-tempat bersantai seperti di warung kopi. Biaya yang dikeluarkan petani dalam melakukan tawar menawar di warung kopi inilah yang digolongkan kedalam biaya tawar.

Hampir sama halnya dengan biaya tawar, biaya mempertahankan kontrak juga terjadi di tempat bersantai seperti warung makan atau warung kopi.

Biasanya petani akan menawarkan untuk membayar semua yang dikonsumsi oleh pemberi pinjaman dengan tujuan untuk mempertahankan kontrak pinjaman kepada pemberi pinjaman. Tujuan ini selalu berhasil sehingga walaupun petani belum mengembalikan pinjaman modal yang sebelumnya, petani tetap bisa mengambil pinjaman modal yang baru. Namun tentunya dengan bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman yang terus bertambah.

Kurangnya pengetahuan petani tentang besarnya biaya bunga (*borrowing cost*) membuat petani tidak beralih dari lembaga pembiayaan non formal ke lembaga pembiayaan formal yang tentu saja memiliki besar bunga yang telah disepakati berdasarkan aturan lembaga. Walaupun bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman (*individual creditor*) sebagai lembaga pembiayaan non formal semakin lama semakin besar, namun segala kemudahan yang ditawarkan diawal peminjaman membuat petani lebih

memilih lembaga pembiayaan non formal ini.

Komponen biaya transaksi yang selanjutnya adalah biaya koordinasi. Biaya ini hampir sama dengan biaya koordinasi yang dikeluarkan pada pembiayaan formal yaitu biaya pertemuan saat peminjaman dan biaya pertemuan saat pengembalian pinjaman. Seluruh biaya yang dikeluarkan petani untuk melakukan kegiatan ini digolongkan kedalam biaya koordinasi.

Persentase biaya transaksi terendah pada pembiayaan non formal adalah biaya pelaksanaan. Hal ini disebabkan pada pembiayaan non formal, tidak dibutuhkan dokumen-dokumen penting melainkan hanya berdasarkan atas asas saling percaya. Biaya pelaksanaan yang dikeluarkan hanya berupa biaya administrasi atau biaya untuk menyatakan bahwa petani tersebut merupakan pihak peminjam. Jumlah biaya yang dikeluarkan juga tidak lebih dari Rp 5000,00.

Tabel 4. Rata-Rata Biaya Transaksi Per Pinjaman

Sumber Pembiayaan	Pembiayaan internal	Pembiayaan formal	Pembiayaan non formal
Jumlah responden (org)	28	84	7
Jumlah modal yang dipinjam (Rp)	-	529.647,06	342.857,14
Jumlah biaya transaksi (Rp)	-	49.827,06	42.964,29
Persentase biaya transaksi/pinjaman (%)	-	9,41	12,53
Jumlah biaya transaksi/ 100.000 pinjaman (Rp)	-	9.407,60	12.531,25

Tabel 4 menunjukkan rata-rata biaya transaksi terhadap jumlah pinjaman. Terlihat bahwa biaya transaksi pada pembiayaan non formal lebih besar daripada biaya transaksi pada pembiayaan formal walaupun secara nominal biaya transaksi pada pembiayaan formal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan non formal. Persentase sebesar 12,53% pada pembiayaan non formal menunjukkan bahwa setiap Rp 100.000 pinjaman modal dikeluarkan biaya transaksi sebesar Rp 12.531,25. Sedangkan pada pembiayaan formal terlihat bahwa, setiap Rp 100.000 pinjaman modal, biaya transaksi yang dikeluarkan sebesar Rp 9.407,60. Jumlah ini sedikit lebih kecil daripada biaya transaksi pada pembiayaan non formal.

Hal ini disebabkan informasi tentang pembiayaan formal lebih merata dibandingkan dengan pembiayaan non formal. Sebagaimana dijelaskan Baye (2010) bahwa ketidaksempurnaan informasi akan memunculkan biaya transaksi. Kondisi di lokasi penelitian juga menunjukkan hal yang sama bahwa sedikitnya informasi tentang lembaga pembiayaan non formal (*individual creditors*) membuat petani mengeluarkan biaya transaksi yang lebih besar daripada biaya transaksi pada pembiayaan formal. Selain biaya informasi yang lebih besar, biaya negosiasi pada pembiayaan non formal juga lebih besar daripada pembiayaan formal. Tidak adanya aturan yang baku dan jelas membuat petani selalu membuat negosiasi dengan

pemberi pinjaman. Dengan tidak disadari bahwa kegiatan negosiasi ini juga mengeluarkan biaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Biaya informasi merupakan komponen biaya transaksi dengan persentase tertinggi pada pembiayaan usahatani baik pembiayaan formal maupun pembiayaan non formal. Biaya informasi yang dihasilkan sebesar 44,84 lalu diikuti oleh biaya negosiasi sebesar 10,64%, biaya koordinasi sebesar 15,99% dan biaya pelaksanaan sebesar 28,54%.
2. Pada pembiayaan non formal, biaya transaksi yang dihasilkan lebih besar yaitu 12,53% sedangkan biaya transaksi pada pembiayaan formal sebesar 9,41%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 100.000 pinjaman modal pada pembiayaan non formal, dikeluarkan biaya transaksi sebesar Rp 12.531,25. Sedangkan pada pembiayaan formal, setiap Rp 100.000 pinjaman modal, dikeluarkan biaya transaksi sebesar Rp 9.407,60.

Saran

Informasi yang merata sangat diperlukan untuk meminimalkan biaya transaksi. Pentingnya sosialisasi dan penyuluhan pertanian tentang akses terhadap sumber pembiayaan akan membuat petani lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman modal dengan pengeluaran biaya yang lebih kecil

DAFTAR PUSTAKA

- Baye MR. 2010. *Managerial Economics and Business Strategy*. Mc Graw-Hill Companies, Inc. 1221 Avenue of the Americas, New York.
- Berge LIO, Kjetil B, Bertil T. 2011. Human and Financial Capital for Microenterprise Development; Evidence from a Field and Lab Experiment. CMI (Chr. Michelsen Institute) Working Paper.
- D'Hondt C. 2008. *Transaction Cost Analysis A-Z*. EDHEC. France
- Moss CB. 2013. *Agricultural Finance*. Routledge. 711 Third Avenue, New York.
- Williamson OE. 1989. *Transaction Cost Economics: An Introduction*. Handbook of Industrial Organization, Volume I. Elsevier Science Publishers B.V. 1989. University of California, Berkeley.

LAMPIRAN

Tabel 1. Produsen Kedelai Terbesar di Indonesia Tahun 2013

No.	Provinsi	Luas panen (Ha)	Produktivitas (%)	Produksi (ton)
1.	Jawa Timur	210.618	15,64	329.461
2.	JawaTengah	65.278	15,21	99.318
3.	Nusa Tenggara Barat	86.882	10,48	91.065
4.	Jawa Barat	35.682	14,34	51.172
5.	Sulawesi Selatan	30.937	14,77	45.693

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Tabel 2. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai di Jawa Timur

No.	Tahun	Luas panen (Ha)	Produktivitas (%)	Produksi (ton)
1.	2009	264.779	13,42	355.260
2.	2010	246.894	13,75	339.491
3.	2011	252.815	14,52	366.999
4.	2012	220.815	16,39	361.986
5.	2013	210.618	15,64	329.461

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014